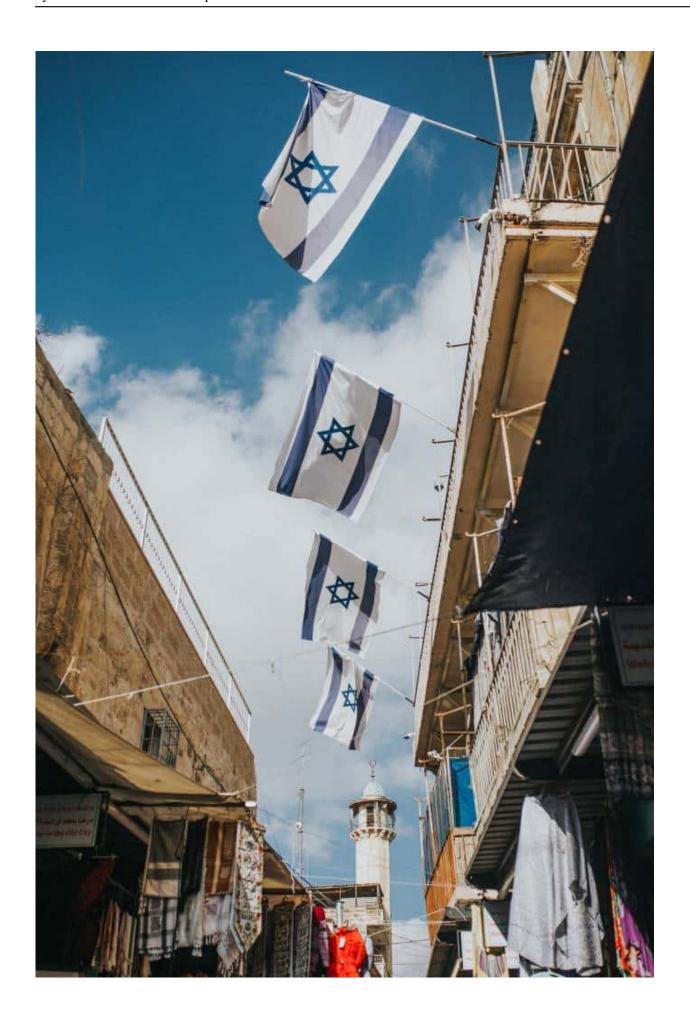
Memahami BDS, Gerakan Protes terhadap Israel

Ditulis oleh Munawir Aziz pada Sabtu, 30 November 2019



Kisah-kisah perjuangan untuk membangun perdamaian Israel-Palestina sudah sering ditampilkan di pelbagai media. Kisah-kisah ini seringkali berakhir dengan getir: air mata yang membuncah, darah yang tak henti menetes hingga kekejaman brutal serdadu militer dari lintas kelompok. Kisah Israel-Palestina memang kisah air mata.

Dalam sebuah forum, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengungkapkan bahwa konflik Israel-Palestina merupakan akar kekerasan dari hampir semua tragedi teror di kawasan Timur Tengah. Pendapat Gus Dur ini rasional, sebab dari konflik Israel-Palestina, termuat perdebatan teologis, historis, hingga silang kepentingan ekonomi-politik lintas negara.

Namun, selalu ada gerakan-gerakan kecil yang memainkan peran penting serta mengubah tatanan global. Gerakan-gerakan protes terhadap kebijakan politik Israel, juga ketidakjelasan lobi pemerintahan Palestina, mengemuka di berbagai negara. Masingmasing punya isu yang diperjuangkan, punya agenda yang terus dimatangkan.

Di antara gerakan protes itu, gerakan BDS cukup menghentak publik. BDS, yakni the Boycott, Divesment and Sanctions movement. Gerakan ini awalnya berupa perlawanan terhadap Zionis. Namun, ketika Israel menyatakan sebagai negara berdaulat, gerakan ini menggeser peran mengkritik kebijakan negara Israel terkait pendudukan, aneksasi dan agresi militer.

Pada konferensi pertama di Ramallah, pada November 2007, para aktifis BDS menyatakan memperluas spektrum gerakan di seluruh dunia. Di antara negara-negara yang menjadi target gerakan yakni Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa, hingga di kawasan Asia Tenggara.

BDS mendeskripsikan dirinya sebagai gerakan yang tanpa hierarki, juga tanpa koneksi dengan jaringan manapun, meski dalam koordinasinya dikelola oleh Komite Nasional BDS Palestina, Omar Barghouti. Sebagai aktifis sosial yang memprotes kebijakan Israel, Omar memang dikenal bersuara keras dan memiliki jaringan di berbagai negara. Ia merupakan seorang Arab Palestina yang bermukim di Israel.

Dalam sebuah wawancara, Omar Barghouti menyebut bahwa hukum Israel itu rasis dan ekslusif. Ia mengatakan bahwa sebagai negara demokrastis haruslah menyediakan ruang bagi Yahudi pencari suaka. Namun, tidak demikian jika hanya mencari keuntungan dari orang Yahudi," demikian kritik Barghouti.

Baca juga: Inilah Materi Pembicaraan Gus Yahya di Israel

Beberapa komunitas yang terhubung dengan BDS, muncul di beberapa negara, semisal Amerika Serikat, Palestina dan Inggris. Di Amerika, BDS terkoneksi dengan organisasi "Jewish Voice for Peace", Student for Justice di Palestina. Sedangkan, di United Kingdom, kegiatan-kegiatan BDS sering difasilitasi oleh 'the Palestine Solidarity Campaign and War on Want'.

Beberapa organisasi tersebut sering menggalang kampanye dengan menyelenggarakan diskusi-diskusi di beberapa kampus, institusi, dan ruang publik. Mereka memprotes keras kebijakan-kebijakan Israel, yang dianggap melanggar hak asasi manusia atau melawan hukum internasional.

Lalu, apakah BDS termasuk gerakan antisemitik? Beberapa petinggi BDS, menyatakan dengan tegas bahwa gerakan kelompoknya tidak bisa dianggap antisemitik. Bahkan, mereka secara terang-terangan melawan gerakan antisemitik.

Tentu saja, hal ini masuk ke wilayah perdebatan yang sensitif di antara aktifis, akademisi maupun komunitas Yahudi di berbagai negara. Orang-orang Yahudi di Amerika Serikat dan Israel, menyebut gerakan BDS sebagai bagian antisemitisme. Kecaman ini didasarkan pernyataan: apakah gerakan yang mendeligitimasi Israel, menggunakan double standar atau menjadikannya terlihat sebagai penjahat?

Kemudian, apakah gerakan BDS itu anti-Zionis?

David M Halbfinger, Michael Wines dan Steven Erlanger dalam esainya di New York Times 'Is B.D.S Anti-Semitic? A Closer Look at the Boycott Israel Campaign' (27 Juli 2019), mengungkap bahwa gerakan BDS secara tegas menyebut anti-Zionis. Dalam dokumen-dokumen yang ditemukan, BDS sebagai gerakan anti-Zionis yang jelas mengkritik kebijakan-kebijakan Israel yang tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

"A Jewish state in Palestine in any shape or form cannot but contravene the basic rights of the indigenous Palestinian population and perpetuate a system of racial discrimination that ought to be opposed categorically," jelas Omar Barghouti.

Sementara, Barghouti juga menegaskan bahwa gerakan BDS merupakan gerakan anti-kekerasan. Kelompoknya tidak mentolerir gerakan kekerasan, atau berusaha menggunakan sebagai aksi untuk mencapai kehendak. Ia menyebut bahwa BDS sebagai "non-violence punitive measure", serta menganggap kekerasan terhadap orang-orang yang non-kombatan sebagai bentuk kekejian.

Baca juga: Kebangkitan Muslim Perkotaan, dari Politik Identitas hingga Sekolah Islam

Sebagai sebuah gerakan yang mengorganisir orang-orang untuk lebih peka terhadap konflik Israel-Palestina, BDS dianggap memunculkan kritik tanpa kekerasan. Namun, BDS juga dianggap tidak berkontribusi apa-apa terhadap proses resolusi konflik antara Israel-Palestina, bahkan dituduh semakin memanaskan intensitas permusuhan.

Publik Amerika Serikat menganggap BDS sebagai gerakan yang cukup efektif untuk mengkritik kebijakan Israel. Hal ini, terungkap dari survey yang dirilis Februari 2019 lalu, bahwa 1 dari 5 orang Amerika Serikat menerima BDS sebagai gerakan oposisi terhadap kebijakan Israel (Rasmunsen Reports, February 2019). Sementara pada Desember 2018 lalu, polling dari University of Maryland menyebut dukungan publik Amerika Serikat untuk gerakan BDS meningkat hingga 40 persen.

Gerakan-gerakan kampanye yang digelar BDS di berbagai negara mendorong impresi negatif atas beberapa merk Israel di pasar internasional. Air BnB, Re/Max, HP, dan beberapa produk Israel mendapat sentimen negatif di media sosial juga perbincangan internet. Selain itu, gerakan BDS juga menyebabkan beberapa perusahaan internasional menggeser/memindah kantornya yang sebelumnya berada di kawasan Tepi Barat (West Bank).

Di kalangan diaspora Yahudi, gerakan BDS berhasil memecah opini kelompok muda, antara yang berpandangan politik moderat, kiri dan kanan. Kelompok sayap kanan dan propendudukan Israel di satu sisi, sedangkan kelompok yang tidak setuju dengan gerakan Zionis berada di sisi lain (Nathan Trall, BDS: How a controversial non-violence movement has transformed the Israeli-Palestinian Debate, the Guardian, 14 Agustus 2018).

Gerakan-gerakan DBS juga berpengaruh pada impresi untuk memboikot produk, kebijakan maupun festival Israel di dunia internasional. Di antaranya, tim nasional sepakbola Argentina menolak bertanding dengan timnas Israel, penyanyi Lana Del Rey keluar dari festival Tel Aviv Music Festival.

Di Indonesia, boikot atas produk Israel juga sering muncul. Bahkan, pada 2016 lalu, Presiden Joko Widodo juga berkampanye di hadapan pemimpin negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) untuk memboikot produk Israel.

Baca juga: Kekuasaan Itu, Menurut Ibnu Khaldun, Seperti Sebatang Pohon Kayu

"Penguatan tekanan terhadap Israel, termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan (Palestina)," demikian pidato Presiden Jokowi di hadapan para petinggi OKI, pada Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (LB) ke-5 OKI, di Jakarta Convention Center (7 Maret 2016),

Dalam konferensi ini, pemerintah Indonesia mendorong lima hal penting merespon konflik Israel-Palestina. (1), penguatan dukungan politik demi menghidupkan kembali proses perdamaian antara Israel-Palestina.

- (2) pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak. (3) Jokowi mendorong peninjauan kembali keberadaan negara kuartet dalam KTT OKI. Arahnya, Indonesia ingin bukan hanya empat negara, melainkan lebih dari itu.
- (4) Indonesia ingin KTT OKI meningkatkan tekanan kepada Dewan Kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memberikan perlindungan bagi Palestina. Indonesia juga mendorong KTT OKI untuk mendesak PBB menetapkan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel atas Palestina.
- (5) KTT OKI didorong untuk menolak secara tegas pembatasan akses beribadah bagi umat Islam di Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status quo dan demografis Al-Quds Al-Sharif.

Dari narasi panjang gerakan BDS di pelbagai penjuru dunia, cukup merepotkan pemerintah Israel dan Amerika Serikat. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat juga memonitor gerakan-gerakan aktifis BDS, hingga beberapa kali menolak visa kunjungan

bagi beberapa aktor BDS yang ingin masuk teritori Amerika Serikat.

Di Indonesia, meski label BDS tidak terlalu muncul di ruang publik, tapi gerakan boikot atas produk-produk Israel sering kali bergema. Namun, berbeda dengan gerakan boikot di Amerika Serikat dan Inggris, gerakan boikot di Indonesia lebih digerakkan faktor sayap kanan Islam politik untuk strategi elektoral. Terutama, menyeruak ketika menjelang Pemilu Nasional maupun Pilkada. Gerakan boikot produk Israel sebagai kendaraan politik yang orientasinya sama sekali berbeda (*). (RM)